

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DKI JAKARTA DALAM PENGAWASAN PEMILUKADA
DKI JAKARTA TAHUN 2024**

SKRIPSI

Oleh:

**ORBYT TITUS PUTRA HIA
2173150015**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DKI JAKARTA DALAM PENGAWASAN PEMILUKADA
DKI JAKARTA TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**ORBYT TITUS PUTRA HIA
2173150015**



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Mayjen Sutoyo, No. 2 Cawang Jakarta 13630
Telp. (021) 8092425, 8009190 ex. 461-463 Fax. 021-80886884

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Orbyt Titus Putra Hia
Nim : 2173150015
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis akhir yang berjudul "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Dalam Pengawasan Pemilu pada DKI Jakarta Tahun 2024" yaitu:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil tinjauan lapangan, kuliah, buku-buku, jurnal, dan referensi lainnya pada karya tugas akhir saya
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 3 Maret 2026



Orbyt Titus Putra Hia



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Mayjen Sutoyo, No. 2 Cawang Jakarta 13630
Telp. (021) 8092425, 8009190 ex. 461-463 Fax. 021-80886884

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA DALAM
PENGAWASAN PEMILUKADA DKI JAKARTA TAHUN 2024

Oleh:

Nama : Orbyt Titus Putra Hia
Nim : 2172150015
Program Studi : Ilmu Politik

Telah dipertahankan dalam sidang tugas akhir dan sudah diperiksa dan disetujui guna mencapai gelar sarjana strata satu pada Program Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 3 Maret 2026

Menyetujui:

Dosen Pembimbing

(Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si)
NIDN. 0321057406

Ketua Program Studi Ilmu Politik

(Indah Novitasari, S.Sos., M.Si (Han))

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



(Dr. Verdimand Robertua, S.Sos., M.Soc., Sc)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Mayjen Sutoyo, No. 2 Cawang Jakarta 13630
Telp. (021) 8092425, 8009190 ex. 461-463 Fax. 021-80886884

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 20 Januari 2026 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Orbyt Titus Putra Hia

Nim : 2173150015

Program Studi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Dalam Pengawasan Pemilihan DKI Jakarta Tahun 2024" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji

Jabatan Dalam Tim Penguji

Tanda Tangan

1 Gaston Otto Malindir, S.I.P., M.I.P.

Ketua

2 Fransiskus X. Gian Tue Mali, S.I.Kom., M.Si

Penguji II

3 Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si

Penguji III



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Mayjen Sutoyo, No. 2 Cawang, Jakarta 13630
Telp. (021) 8092425; 8009190 ext. 461-463 Fax. 021-80886884

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Orbyt Titus Putra Hia
NIM : 21731500015
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Politik
Judul : Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Dalam Pengawasan Pemilu Pilkada DKI Jakarta Tahun 2024

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik diperguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non eksklusif Tanpa Royalti Kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hakeipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademik yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 3 Maret 2026

Yang menyatakan,

Orbyt Titus Putra Hia

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kasih, dan karunia serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Dalam Pengawasan Pemilu pada DKI Jakarta Tahun 2024”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia (FISIPOL UKI).

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik dalam pengumpulan data, analisis, maupun penyajian hasil penelitian. Keterbatasan kemampuan, pengalaman, dan wawasan masih menjadi kekurangan dalam penyempurnaan karya ilmiah ini. Namun, proses tersebut memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan akademik dan pemahaman terhadap isu pengawasan Pemilu, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Penulis juga memperoleh banyak inspirasi dan wawasan selama menjalani studi di Program Studi Ilmu Politik FISIPOL UKI, yang menjadi bekal berharga dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, dan bantuan berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada orang tua tercinta, Bapak Sinufa Hia dan Ibu Nibenia Zebua, terima kasih atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tidak pernah terputus.

Dukungan moral, materil, spiritual, dan motivasi dari Bapak dan Ibu menjadi kekuatan terbesar bagi penulis dalam menempuh pendidikan hingga tahap ini. Tanpa doa dan penguatan dari keluarga, proses ini tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

2. Ibu Indah Novitasari, S.Sos., M.Si (Han), selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan atas perhatian, arahan, motivasi, serta dukungan yang selalu Ibu berikan kepada seluruh mahasiswa.
3. Ibu Dr. Isbodroini Suyanto, MA, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, serta masukan Ibu selama penyusunan skripsi. Dukungan, kesabaran, dan ketelitian Ibu dalam memberikan evaluasi sangat membantu penulis memahami dasar penelitian dan membangun fondasi skripsi ini, sehingga penulis sangat bersyukur mendapatkan bimbingan Ibu pada tahap awal penelitian.
4. Bapak Dr. Sidratahta Mukhtar, M.Si, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih atas bimbingan dan kesabaran Bapak dalam membimbing penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir. Arahan, kritik, dan saran yang Bapak berikan telah membantu penulis untuk berpikir lebih kritis, sistematis, dan akademis. Penulis bersyukur memiliki pembimbing yang selalu memberikan motivasi dan tidak lelah membimbing.
5. Bapak Fransiskus X. Gian Tue Mali, S.I.Kom., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih yang mendalam penulis sampaikan atas semua perhatian, waktu, dan arahan yang sangat berarti selama penulis

menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Politik. Terima kasih juga telah memberikan kerangka berpikir dan arah yang jelas dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak Gaston Otto Malindir, S.I.P., M.I.P, penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan, serta saran yang Bapak berikan selama proses pengerjaan skripsi. Masukan Bapak telah membantu memperkuat dan memperbaiki kualitas penelitian ini. Semoga ilmu dan dedikasi Bapak terus menjadi manfaat bagi banyak mahasiswa.
7. Seluruh Dosen dan staf Program Studi Ilmu Politik, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan bantuan administratif selama masa studi dan penyusunan skripsi ini.
8. Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, terkhusus Bapak Burhanuddin, Bapak Munandar Nugraha, dan Bapak Benny Sabdo serta para informan lainnya, terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas kesempatan, waktu, dan informasi yang telah diberikan. Data dan penjelasan yang disampaikan sangat membantu penulis dalam memperoleh pemahaman yang mendalam dan memperkaya hasil penelitian ini.
9. Saudara-saudari dan seluruh keluarga besar, terima kasih atas dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Setiap bentuk bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sangat berarti dan menjadi penguat dalam melewati berbagai proses akademik.

10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.



DAFTAR ISI

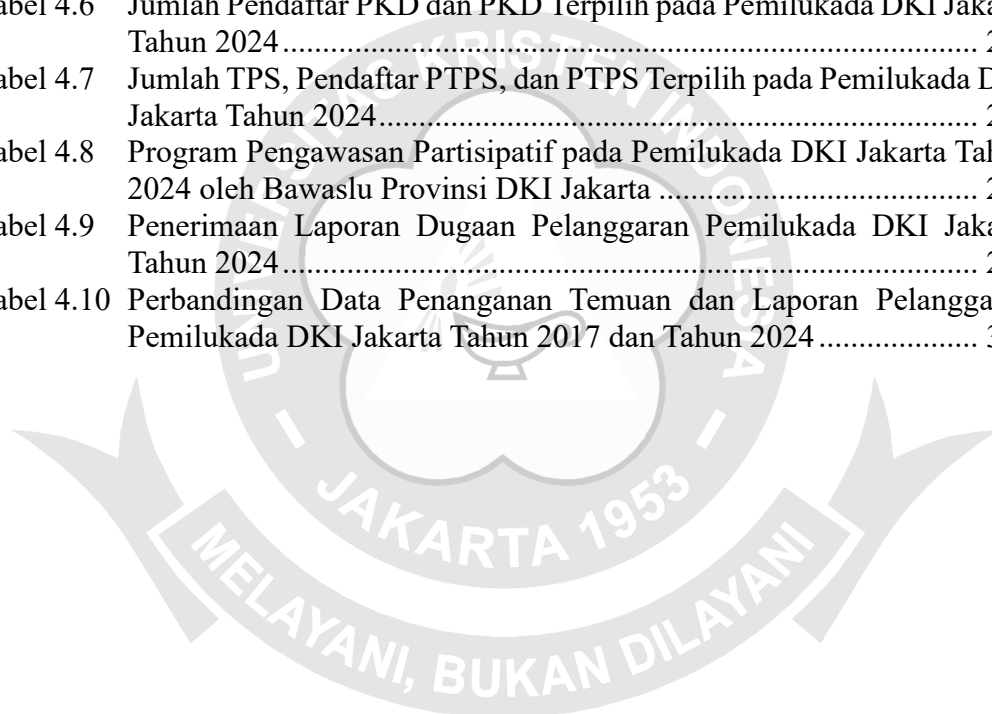
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Pertanyaan Penelitian	21
1.4 Tujuan Penelitian.....	22
1.4.1 Tujuan Akademik.....	22
1.4.2 Tujuan Praktik.....	22
1.5 Signifikansi Penelitian.....	23
1.5.1 Signifikansi Akademik.....	23
1.5.2 Signifikansi Praktis.....	23
1.6 Tinjauan Pustaka	24
1.7 Landasan Teoritik.....	27
1.7.1 Teori Demokrasi	27
1.7.2 Konsep Pengawasan	56
1.7.3 Konsep Pemilu.....	62
1.8 Bagan Alur Pemikiran	65
1.9 Metode Penelitian.....	67
1.9.1 Pendekatan Penelitian	68
1.9.2 Desain Penelitian	69
1.9.3 Teknik Pengumpulan Data.....	70
1.9.4 Informan	72
1.9.5 Instrumen Penelitian	77
1.9.6 Teknik Analisis Data.....	84
1.10 Sistematika Penulisan.....	86
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	89
2.1 Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	89
2.2 Provinsi DKI Jakarta	103
2.2.1 Geografis Provinsi DKI Jakarta.....	103
2.2.2 Demografis Provinsi DKI Jakarta.....	105
2.2.3 Tingkat Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	108

2.3	Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Pengawas Provinsi DKI Jakarta ..	110
2.4	Indeks Demokrasi Provinsi DKI Jakarta	113
BAB III PENGAWASAN PESERTA PADA PEMILUKADA DKI JAKARTA TAHUN 2024.....		116
3.1	Menetapkan Standar	116
3.2	Pemahaman Tentang Tindakan yang Diperlukan	148
3.3	Informasi Mengenai Pencapaian (Memantau Perkembangan).....	158
3.4	Melakukan Penilaian (Evaluasi).....	220
3.5	Melakukan Tindakan Perbaikan	233
BAB IV IMPLIKASI PENGAWASAN PESERTA PADA PEMILUKADA DKI JAKARTA TAHUN 2024 TERHADAP DEMOKRASI.....		248
4.1	Supremasi Hukum	248
4.2	Partisipasi	267
4.3	Kompetisi	283
4.4	Akuntabilitas	297
4.5	Kebebasan dan Kesetaraan.....	303
4.6	Responsivitas.....	313
BAB V PENUTUP		319
5.1	Kesimpulan.....	319
5.2	Saran.....	320
5.2.1	Saran Akademik	320
5.2.2	Saran Praktis	322
DAFTAR PUSTAKA.....		324
LAMPIRAN.....		334

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Pasangan Calon dan Partai Pengusung Pemilu pada DKI Jakarta Tahun 2024.....	10
Tabel 1.2	Perbandingan Data Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu pada DKI Jakarta Tahun 2017 dan Tahun 2024.....	14
Tabel 1.3	Daftar Informan Penelitian.....	72
Tabel 1.4	Operasionalisasi Variabel/Teoritis.....	78
Tabel 2.1	Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.....	96
Tabel 2.2	Luas Wilayah dan Jumlah Pulau Pada Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta.....	104
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin.....	105
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	106
Tabel 2.5	Indikator Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.....	108
Tabel 2.6	Daftar Pemilih Tetap Pemilu pada Provinsi DKI Jakarta Tahun.....	111
Tabel 2.7	Distribusi Jumlah Pengawas Pemilu pada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Berdasarkan Tingkatan Pengawasan.....	112
Tabel 3.1	Standar Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam Tahapan Pencalonan pada Pemilu pada DKI Jakarta Tahun 2024.....	121
Tabel 3.2	Standar Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam Tahapan Kampanye pada Pemilu pada DKI Jakarta Tahun 2024.....	128
Tabel 3.3	Standar Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu pada DKI Jakarta Tahun 2024.....	133
Tabel 3.4	Standar Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam Tahapan Rekapitulasi Suara pada Pemilu pada DKI Jakarta Tahun 2024.....	136
Tabel 3.5	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengawas Pemilu pada DKI Jakarta Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.....	155
Tabel 3.6	Pelibatan Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu pada DKI Jakarta Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.....	208
Tabel 3.7	Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi DKI Jakarta menurut Periode Pemilihan.....	210
Tabel 3.8	Penerimaan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan di Provinsi DKI Jakarta.....	213
Tabel 3.9	Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Peserta Pemilu pada DKI Jakarta Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.....	214
Tabel 3.10	Klasifikasi Jenis Dugaan Pelanggaran Pemilu pada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Se-Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.....	216
Tabel 3.11	Klasifikasi Jenis Dugaan Pelanggaran Pemilu pada Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.....	216
Tabel 3.12	Kegiatan Peningkatan Pendidikan Politik oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.....	245

Tabel 3.13	Peningkatan Kapasitas SDM Jajaran Pengawas oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	246
Tabel 4.1	Penanganan dan Tindak Lanjut Pelanggaran Peserta Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	258
Tabel 4.2	Tahapan Pembentukan Panwascam pada Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024.....	271
Tabel 4.3	Tahapan Pembentukan PKD pada Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024	271
Tabel 4.4	Tahapan Pembentukan PTPS pada Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024	272
Tabel 4.5	Jumlah Pendaftar, Panwascam Existing, dan Panwascam Terpilih pada Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024.....	277
Tabel 4.6	Jumlah Pendaftar PKD dan PKD Terpilih pada Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024.....	278
Tabel 4.7	Jumlah TPS, Pendaftar PTPS, dan PTPS Terpilih pada Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024.....	278
Tabel 4.8	Program Pengawasan Partisipatif pada Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024 oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta	280
Tabel 4.9	Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024.....	282
Tabel 4.10	Perbandingan Data Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2017 dan Tahun 2024.....	317



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Pemikiran	66
Gambar 3.1	Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024	162
Gambar 3.2	Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024	163
Gambar 3.3	Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024	164
Gambar 3.4	Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Tahapan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024	165
Gambar 3.5	Dugaan Pelanggaran Pencatutan KTP	167
Gambar 3.6	Patroli Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Tahapan Kampanye Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024.....	168
Gambar 3.7	Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap Debat pada Tahapan Kampanye Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024	169
Gambar 3.8	Dugaan Pelanggaran Politik Uang dalam Bentuk Pemeriksaan Kesehatan Mata dan Pembagian Kacamata Gratis	171
Gambar 3.9	Dugaan Pelanggaran Politik Uang melalui Via Aplikasi.....	172
Gambar 3.10	Dugaan Pelanggaran Penghadangan Pengawas.....	174
Gambar 3.11	Pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta pada Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024.....	176
Gambar 3.12	Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Hasil Suara	178
Gambar 3.13	Penyampaian Laporan Pelanggaran Pemilukada di Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.....	212
Gambar 4.1	Tampilan Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan	249
Gambar 4.2	Tampilan Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilu RI.....	250
Gambar 4.3	Tampilan Laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum	250
Gambar 4.4	Pengumuman Pembukaan Rekrutmen Pengawas Ad Hoc pada Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024	270
Gambar 4.5	Dugaan Pelanggaran Pencatutan KTP pada Tahapan Pencalonan Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024	291
Gambar 4.6	Dugaan Pelanggaran Politik Uang Melalui Aplikasi Smart Door to Door pada Tahapan Kampanye Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024	293
Gambar 4.7	Pengrusakan APK Peserta Pemilukada DKI Jakarta Tahun 2024	310

DAFTAR SINGKATAN

AMI	: Anak Indonesia
APK	: Alat Peraga Kampanye
APK	: Angka Partisipasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
APS	: Angka Partisipasi Sekolah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
Bimtek	: Bimbingan Teknis
BPS	: Badan Pusat Statistik
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPP	: Daftar Pemilih Pindahan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah
EUI	: <i>The Economist Intelligence</i>
FB	: <i>Facebook</i>
FGD	: <i>Forum Group Discussion</i>
Gakkumdu	: Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Garuda	: Garda Republik
Gelora	: Gelombang Rakyat Indonesia
Gerindra	: Gerakan Indonesia Raya
Golkar	: Golongan Karya
Hanura	: Hati Nurani Rakyat
ICW	: <i>Indonesia Corruption Watch</i>
IDI	: Indeks Demokrasi Indonesia
IG	: <i>Instagram</i>
IKP	: Indeks Kerawanan Pemilu
Info Pemilu	: Sistem Informasi Data dan Tahapan Pemilu
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
Japar	: Jawara dan Pengacara
Kemendragi	: Kementerian Dalam Negeri
KIM	: Koalisi Indonesia Maju
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LPU	: Lembaga Pemilihan Umum

LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
Luber jurdil	: Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
MAKTAB	: Masyarakat Petamburan
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
NasDem	: Nasional Demokrat
Ormas	: Organisasi kemasyarakatan
PAN	: Partai Amanat Nasional
Panwascam	: Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
Panwaslak Pemilu	: Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilu
PBB	: Partai Bulan Bintang
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PDP	: Perlindungan Data Pribadi
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pemilukada	: Pemilihan Umum Kepala Daerah
Perindo	: Persatuan Indonesia
Perludem	: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
Pilkades	: Pemilihan Kepala Desa
PIP	: Program Indonesia Pintar
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKD	: Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa
PKN	: Partai Kebangkitan Nusantara
PKPU	: Peraturan KPU
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PMJAK	: Petisi Masyarakat Jakarta Anti Korupsi
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PRIMA	: Partai Rakyat Adil Makmur
PSI	: Partai Solidaritas Indonesia
PTPS	: Pengawas Tempat Pemungutan Suara
RI	: Republik Indonesia
RLS	: Rata-rata Lama Sekolah
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RW	: Rukun Warga
SARA	: Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIDALI	: Sistem Informasi Pencalonan
Silon	: Sistem Pencalonan
SM	: Sebelum Masehi
SOP	: Standar Operasional Prosedur
Susenas	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPS	: Tempat Pemungutan Suara

TSM : Terstruktur, Sistematis, dan Masif
UU : Undang-Undang
WNI : Warga Negara Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian.....	334
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	340
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	387



ABSTRAK

Pemilukada merupakan sarana untuk mewujudkan demokrasi yang berlangsung secara luber dan jujur. Namun, pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilihan terus berulang dan mempengaruhi kualitas demokrasi lokal. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu daerah dengan IKP (skor 88,95) tertinggi di Indonesia pada tahun 2024, sehingga pengawasan Pemilukada menjadi semakin penting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta serta menguraikan implikasi pengawasan tersebut terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilukada DKI Jakarta tahun 2024 yang luber dan jujur dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui pengawasan langsung, pelibatan masyarakat, dan mekanisme pelaporan dengan berpedoman pada UU No. 7 Tahun 2017, UU No. 10 Tahun 2016, Perbawaslu No. 6 Tahun 2024, serta berbagai Perbawaslu pada setiap tahapan Pemilukada. Pengawasan tersebut berkontribusi terhadap penurunan jumlah pelanggaran dan menjaga stabilitas politik. Namun implementasinya masih memiliki hambatan pada regulasi, terkendala koordinasi dan kapasitas SDM, rendahnya pendidikan politik masyarakat, budaya politik yang berorientasi pada kepentingan pribadi, serta lemahnya efektivitas mekanisme pelaporan. Selain itu, pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas demokrasi secara optimal dalam beberapa indikator. Dalam aspek supremasi hukum, penegakan terhadap pelanggaran belum diselesaikan secara tuntas sehingga mempengaruhi keadilan penegakan hukum. Pada indikator kompetisi, persaingan antar peserta juga belum sepenuhnya berjalan secara teratur dan adil karena masih ditemukan pelanggaran pada beberapa tahapan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak ditindak secara tegas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memiliki peran strategis dalam menjaga integritas Pemilukada, namun memerlukan penguatan kelembagaan, koordinasi, dan pembaruan regulasi.

Kata kunci: Pemilukada, Bawaslu, Pelanggaran Pemilu, Pengawasan, Demokrasi

ABSTRACT

Regional elections are a means of realizing democracy that is free, fair, and honest. However, violations committed by election participants continue to recur and affect the quality of local democracy. The province of DKI Jakarta is one of the regions with the highest IKP (score of 88.95) in Indonesia in 2024, making supervision of regional elections increasingly important. This study aims to analyze the monitoring process carried out by the DKI Jakarta Provincial Election Supervisory Agency (Bawaslu) and describe the implications of this monitoring on the quality of the 2024 DKI Jakarta regional elections, which were free and fair, in improving the quality of democracy. The method used is a qualitative approach with a case study design and data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study show that the DKI Jakarta Provincial Bawaslu's supervision is carried out through direct supervision, community involvement, and reporting mechanisms based on Law No. 7 of 2017, Law No. 10 of 2016, Bawaslu Regulation No. 6 of 2024, and various Bawaslu regulations at each stage of the regional elections. This supervision contributes to a decrease in the number of violations and maintains political stability. However, its implementation still faces obstacles in terms of regulations, coordination and human resource capacity, low levels of political education among the public, a political culture oriented towards personal interests, and the weak effectiveness of reporting mechanisms. In addition, the supervision carried out has not been fully able to optimally improve the quality of democracy in several indicators. In terms of the rule of law, violations have not been thoroughly addressed, thereby affecting the fairness of law enforcement. In terms of competition, competition between participants has not been fully regulated and fair, as violations have been found in several stages of the regional elections that have not been dealt with decisively. This study concludes that the supervision of the DKI Jakarta Provincial Bawaslu has a strategic role in maintaining the integrity of regional elections, but requires institutional strengthening, coordination, and regulatory reform.

Keywords: *Regional Elections, Bawaslu, Election Violations, Supervision, Democracy*